

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Kedua*. Bandung : Refika Aditama.
- . 2018. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah Edisi Revisi*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Andasasmita, Komar. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit*. Bandung : Alumni.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2021. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit (Dalam Perjanjian Kredit Bank)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Komariah. 2005. *Hukum perdata*, Malang : UMM Press
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- . 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerodjo, Irwan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*.

Surabaya : Arkola.

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,*

Teori, dan Praktik), Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah*

Lembaga Hukum Notariat, Bandung : Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Undang-Undang Pokok
Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas
Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

JURNAL

Abdullah, Nawaaf dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. “*Kedudukan dan Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*”, Jurnal Akta Vol 4 No. (4).

Azizah, Nur, dkk. 2022. “*Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor PPAT Wilayah Banjarmasin Utara)*”, Notary Law Journal Vol 1 No. (2).

Dewa Gde Rudy, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. “*Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 9 No. (1).

Purnayasa, Agus Toni. 2018. “*Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*”, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. (3).

Silviana, Ana. 2020. “*Fungsi SKMHT Dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah)*”, Diponegoro Private Law Review, Vol.7, No.1.

Tulenan, Ghita Aprillia. 2014. “*Kedudukan dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris*”, Jurnal Lex Administratum II, No. 2.

WAWANCARA

Wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT di Kabupaten Kendal yakni Notaris/PPAT Anisitus Amanat Gaham pada tanggal 19 Februari 2024.